

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PUNGUTAN LIAR
(Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak)
Oleh:**

**HARJANTO, SH
A.21212022**

**Pembimbing I dan II :
Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum. H.M. Noor Ramli, SH., M.S.**

ABSTRACT

This thesis is studies of the issue of sanction of imprisonment and fines against civil servants who undergo corruption extortion (Study In Pontianak Corruption Court). From the results of research using normative legal research we concluded that: 1. The application of criminal sanctions can dimaknakan as deeds, actions or judgments in criminal dropped against defendants who were accused of general or specific in criminal justice proceedings. Theoretically, juridical and empirical, the judge in applying criminal sanctions must be referring to the philosophical core of truth and justice, cored juridical norms of legal certainty and legal expediency, as well as sociological value taking into account cultural values that live and thrive in the community. When examined Pontianak District Court No. 14 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2013 / PN.PTK, then tetlihat that the judges only consider the juridical aspect alone. While the philosophical and sociological aspects are not taken into consideration at all. So that the imposition of sanctions of imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp. 50 000 000, - (fifty million dollars) with the provision that if the fine is not paid to be replaced by imprisonment for 1 (one) month is considered not reflect the value of substantive legal justice. 2. To give the value of truth, fairness, certainty, and legal expediency better into the future, the application of criminal sanctions against corruption by judges should be guided by the purpose of the criminal justice and sentencing guidelines as set out new Criminal Code or after the adoption of the Draft Bill Draft Definitive 13 to the Criminal Code. Selanjunya recommended, harmony with the provisions of Article 211 of the Criminal Code First Book Draft Bill 13, which determines the "provisions in Chapter I to Chapter V of the First Book also applies to actions that can be imprisoned under other legislation, unless otherwise provided by legislation the ", then forward the settings application of criminal sanctions against corruption, in general, should be guided by the new Code.

Keywords: application, imprisonment, criminal fines, civil servants, corruption, extortion.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah penerapan sanksi pidana penjara dan denda terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi pungutan liar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa: 1. Penerapan sanksi pidana dapat dimaknakan sebagai perbuatan, tindakan atau putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana umum maupun khusus di persidangan peradilan hukum pidana. Secara teoretis, yuridis maupun empiris, hakim dalam menerapkan sanksi pidana haruslah mengacu pada nilai filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, norma yuridis berintikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta nilai sosiologis dengan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika dicermati Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 14/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, maka tetlihat bahwa Majelis Hakim **hanya**

mempertimbangkan aspek yuridis semata. Sedangkan aspek filosofis dan sosiologis sama sekali tidak dipertimbangkan. Sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan **dinilai belum mencerminkan nilai keadilan hukum substantif.** 2. Untuk memberikan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang lebih baik ke masa depan, maka penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi oleh majelis hakim peradilan pidana haruslah mempedomani tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur KUHP baru atau setelah disahkannya RUU KUHP Draft 13 menjadi KUHP Definitif. Selanjutnya direkomendasikan, Seirama dengan ketentuan Pasal 211 Buku Kesatu RUU KUHP Draft 13, yang menentukan **“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut”**, maka ke depan pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, secara umum haruslah mempedomani KUHP yang baru.

Kata Kunci: penerapan, pidana penjara, pidana denda, pegawai negeri sipil, tindak pidana korupsi, pungutan liar.

Latar Belakang

Diformulasikannya sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus di luar KUHP, berfungsi sebagai norma pencegah dan penegak terhadap pelanggaran hukum pidana oleh subyek hukum pidana baik orang maupun badan hukum. Norma penegak ini akan dijadikan acuan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim di pengadilan untuk menerapkan berat ringannya ancaman pidana yang harus didakwakan, dituntut dan dijatuhkan kepada subyek hukum yang melakukan tindak pidana sesuai kesalahannya. Tanpa norma penegak yang disebut sebagai sanksi pidana, maka suatu larangan, keharusan atau kewajiban yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP tidak akan efektif daya lakunya. Karena itu, eksistensi norma sanksi pidana menjadi sangat penting dalam upaya menegakkan hukum pidana.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus ternyata cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana yang memenuhi nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada sipelaku ataupun untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada gilirannya penerapan sanksi pidana yang demikian itu juga kurang/tidak mencerminkan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan hukum.¹

Jika dicermati putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang kerap dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat, umumnya karena dinilai belum mencerminkan nilai tujuan pemidanaan dan tujuan hukum yang dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi terhadap para koruptor di berbagai daerah;
- b. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana di bawah pidana minimal khusus, atau ;
- c. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang cenderung menerapkan sanksi pidana minimal mendekati atau sedikit di atas sanksi minimal khusus;
- d. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana berdasarkan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih ringan dibanding dakwaan primair dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sehingga menimbulkan antipati atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap bekerjanya hukum di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. Hlm. 745: "penerapan berasal dari kata terap yang berarti proses, cara. Penerapan bermakna perbuatan atau tindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu hal".

Kemudian apabila dicermati pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, formulasinya memang sudah menormatiskan sanksi pidana **minimal khusus** dan **maksimal umum** yang dikomulasikan dengan pidana denda dan/atau diformulasikan alternatif dengan sanksi pidana denda.

Selain mengatur sanksi pidana minimum khusus Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga memformulasikan beban pembuktian terbalik, terhadap tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negaranya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Dalam hal ini terdakwa yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Terkait dengan adanya putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang cenderung menerapkan sanksi pidana minimal mendekati atau sedikit di atas sanksi minimal khusus, serta yang menerapkan sanksi pidana berdasarkan dakwaan subsidair, meskipun dakwaan primair juga terbukti secara sah dan meyakinkan.

Permasalahan

Bagaimana seharusnya penerapan sanksi pidana yang lebih bersesuaian dengan tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi untuk masa yang akan datang?

Pembahasan

A. Penerapan sanksi pidana yang lebih bersesuaian dengan tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi untuk masa yang akan datang

Untuk memberikan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang lebih baik ke masa depan, pemerintah telah membentuk Tim Perancang (Pembaharuan) KUHP Indonesia. Pada saat ini tim tersebut telah berhasil menyusun RUU KUHP Draft 13 dengan mengacu pada doktrin ilmu hukum pidana dan pendapat para pakar hukum pidana, baik dari aspek filsafat pemidanaan maupun formulasinya secara umum.

1. Aspek filsafat Pemidanaan

Secara teoretis, filsafat pemidanaan dalam konteks peradiln pidana di Indonesia, mempunyai tiga dimensi utama yaitu **“pidana”**, **“sistem pemidanaan”** dan **“teori pemidanaan”**. Ketiga dimensi itu akan mengarahkan bagaimana seharusnya penjatuhan pidana

oleh hakim dalam proses peradilan pidana.² Sebab pidana hakikatnya mengandung unsur-unsur:³

- a. pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- c. dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selain itu, pidana juga berorientasi pada “**sanksi pidana**” sebagai “penjamin/garansi terbaik” (*prime guarantor*) sekaligus “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau sebagai **alat/sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan**. Dengan kata lain:⁴

- (a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; masyarakat tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
- (b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*);
- (c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Selanjutnya “sistem pemidanaan” atau “*the sentencing system*” hakikatnya merupakan “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁵ Bahkan menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

- (1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan ;
- (2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana ;
- (3) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- (4) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁶

² Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan, Artikel, PN Kepanjen, 2008.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008, Hlm.

Dengan memahami dimensi konteks filsafat pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana/Eksekusi Pidana haruslah dipandang sebagai satu kesatuan sistem pidana. Kemudian secara global dan representatif “sistem pidana” atau “*the sentencing system*” mempunyai beberapa dimensi hakiki, yaitu:

- (1) Dari perspektif pidana itu sendiri, pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
- (2) Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.⁷
- (3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidana dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan. Sistem pidana juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal) ;
 - b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’);
 - c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁸

Tetapi menurut praktiknya apakah memang ada “filsafat pidana” dalam kerangka kebijakan legislatif ataukah kebijakan aplikatif di Indonesia? Menurut Lilik Mulyadi, ketidakjelasan falsafah pidana saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan pidana (*criminal policy*) yang sampai kini belum dirumuskan. Merupakan impian *criminal justice*, agar para pengambil keputusan di bidang hukum, khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM,

⁷ Lilik Mulyadi, Pergeseran,...*Op. Cit.*

⁸ *Ibid.*

Kepolisian dan DPR untuk duduk bersama, urun rembug menghasilkan *criminal policy*, dengan dilandasi falsafah pemidanaan yang tepat untuk Indonesia.”⁹

Memang, hakikatnya untuk saat ini kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif terlebih lagi kebijakan pemidanaan dalam takaran aplikatif diperlukan dan mendesak sifatnya. Ada beberapa aspek mengapa kebijakan ini perlu dirumuskan, salah satunya adalah untuk sedapat mungkin diharapkan relatif **menekan adanya disparitas** dalam pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama. Disparitas, hakikatnya merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁰

Dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice. Konkretnya, konsekuensi logis aspek ini maka **putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.** Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia belum ada pedoman pemidanaan yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim.¹¹

Aspek tersebut ditegaskan pula oleh Sudarto bahwa: “KUHP kita **tidak memuat pedoman pemberian pidana** (*straftoemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*)”.¹²

Selain itu, pedoman pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang-undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Aspek ini penting sifatnya oleh karena sebenarnya kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislatif akan berpengaruh besar kepada kebijakan aplikatif yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu tentu diperlukan **sikronisasi, transparansi dan latar belakang yuridis tentang hakekat apa dari suatu undang-undang, apa yang diinginkan**

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 79-80.

oleh pembentuk undang-undang terkonkretisasi sehingga hakim sebagai kebijakan aplikatif tidak salah menerapkan dan mewejahwantahkan undang-undang.¹³

Sehubungan dengan itu, penting dipahami oleh para hakim tentang konsepsi-konsepsi tujuan pidana yang dibedakan atas tiga teori utama, yaitu:¹⁴

- a. Teori absolut (retributif): Memandang pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pelaku atau berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Maka, sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata dikarenakan si pelaku telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. teori teleologis (tujuan): memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, **tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat**. Intinya bertujuan **untuk mencegah secara umum agar orang tidak melakukan kejahatan (prevensi umum)**.
- c. teori retributive teleologis: Merupakan gabungan dari prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pidana adalah :
 - 1) Pencegahan umum dan khusus: Pencegahan umum ditujukan kepada seluruh subyek hukum baik orang maupun badan hukum untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan kepada sipelaku agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana (efek jera subyektif).
 - 2) Perlindungan masyarakat dan memelihara solidaritas masyarakat : Ini merupakan aplikasi dari doktrin “*social defence*” dan “*social welfare*”, bahwa tujuan akhir dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindakan kriminal dan untuk memberikan kesejahteraan/kemakmuran kepada masyarakat luas secara ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Menagacu pada doktrin tujuan pidana di atas, maka menurut pendapat penulis, penerapan sanksi pidana yang lebih bersesuaian dengan tujuan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk masa yang akan datang adalah senantiasa **berbasis pada nilai pencegahan umum, pencegahan khusus, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan solidaritas masyarakat**. Kongkretnya, efektifitas penerapan sanksi pidana itu terwujud apabila pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek pencegahan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian mampu secara permanen memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk ancaman kejahatan dan tindak pidana korupsi serta membangun solidaritas masyarakat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5, 49-51. Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 142.

2. Formulasi dalam RUU KUHP Draft 13

Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP Draft 13 memformulasikan: “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Kemudian ayat (2) menormatiskan: “untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut menurut (3) “setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembedah”. Alasan pembedah ini dinormatiskan dalam Pasal 31 sampai Pasal 35 yang intinya menyatakan:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan **untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan**, tidak dipidana (Pasal 31);
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut **untuk melaksanakan perintah jabatan**, tidak dipidana (Pasal 32);
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana karena **keadaan darurat**, tidak dipidana (Pasal 33);
- d. Setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena **pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain**, tidak dipidana (Pasal 34);
- e. Pasal 35 : “Termasuk alasan pembedah adalah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)”.

Jika alasan pembedah di atas, dihubungkan dengan alasan pembedah pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 14/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, yang menyatakan: “**terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa mempunyai tanggungan keluarga**”, maka menurut pendapat penulis pertimbangan tersebut sama sekali tidak memenuhi substansi Pasal 31 sampai Pasal 35 RUU KUHP Draft 13 di atas.

Dalam konteks ini, patut dipahami, Pasal 12 RUU KUHP Draft 13 menyatakan: (1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan **tegaknya hukum** dan **keadilan**. (2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, **hakim dapat mengutamakan keadilan**. Dalam penjelasannya menyatakan: “Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut.

Apabila dalam penerapan dalam kejadian kongkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin mengutamakan **keadilan** di atas kepastian hukum”.

Karena itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Draft 13 diformulasikan tujuan pemidanaan, bertujuan untuk:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut penjelasannya, pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Kemudian ayat (2) menyatakan : “Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”. Meskipun pidana **pada dasarnya merupakan suatu nestapa**, namun pemidanaan tidak **dimaksudkan untuk menderitakan** dan **tidak merendahkan martabat manusia**.

RUU KUHP juga memformulasikan pedoman pemidanaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 menentukan, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. kesalahan pembuat tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pembuat tindak pidana; d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitative artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam

rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.

Dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung pelbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana” yang antara lain ditandai dengan masuknya Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (haatzaai-artikelen) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dilakukan atas dasar misi keempat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Pelbagai misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum yang tetap memandang perlu penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelbagai pembaharuan dan/atau perubahan yang terjadi terhadap KUHP maupun Undang-Undang Pidana di luar KUHP selama ini pada dasarnya bersifat ad hoc dan

bernuansa evolusioner serta tidak dapat memenuhi tuntutan 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas yaitu : dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi, sehingga penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru harus dilakukan.

Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini tidak membedakan lagi antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*). Untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru hanya terdiri atas 2 (dua) Buku yaitu Buku Kesatu memuat Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang memuat ketentuan tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secara selektif ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana.

Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai “*rechtsdelict*” dan pelanggaran sebagai “*wetsdelict*” ternyata tidak dapat dipertahankan, karena dalam perkembangannya tidak sedikit beberapa “*rechtsdelict*” dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan “*wetsdelict*” dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancamannya. Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannya kualitas dan dampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatif semacam ini dalam kenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada

manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*). Di samping itu, masih dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku juga secara umum untuk tindak-tindak pidana lain baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (*straf*), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib (*maatregel*). Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualian dimungkinkan penerapan asas "*strict liability*" dan asas "*vicarious liability*". Dalam hal yang pertama, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang kedua tanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diatur mengenai jenis pidana berupa pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok terdiri atas : a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai

alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*). Hakim bebas memilih jenis jenis pidana (*strafsoort*) yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Dalam pembedaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*), sebab di samping jenis jenis pidana tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pula jenis jenis tindakan (*maatregelen*). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental. Di samping itu dalam hal tertentu tindakan dapat pula diterapkan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial.

Kesimpulan

Untuk memberikan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang lebih baik ke masa depan, maka penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi oleh majelis hakim peradilan pidana haruslah mempedomani tujuan dan pedoman pembedaan sebagaimana diatur KUHP baru atau setelah disahkannya RUU KUHP Draft 13 menjadi KUHP Definitif.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Aloysius Wisnubroto, 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Arie Sukanti Hutagalung, 1985. Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Balai Penerbitan UNDIP.
- _____, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- _____, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- _____, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang.
- Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Bandung : Armico.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Susilo, 1979. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor : Politeia.
- Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Satochid Kartanegara, tt. Satochid, Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.

Soedarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi: Suatu Pengantar, Bandung: Rajawali Pres.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma.

Sudarto, 1976. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Syed Hussein Al Atas, 1987, Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi, Terjemahan Nirwono, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Pertama.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 14/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK.